

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2025

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
KEARSIPAN					
1, 2,	Surat, Nota Dinas Daftar Pengaduan Masyarakat terkait Identitas Pelapor /Pemohon Informasi dan isi laporan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; 2. UU. No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2) 3. UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia	Selama Undang-Undang Berlaku Selama Undang-Undang Berlaku	Menghambat proses penyusunan kebijakan, Data dapat disalahgunakan mengungkapkan data pribadi pelapor yang bersifat rahasia	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum
3,	Disposisi Surat Pimpinan	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama belum ada tindak lanjut dari pengelola Surat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
KEUANGAN					
4,	Arsip Dinamis, aktif dan inaktif yang yang belum di audit antara lain : a. Dokumen keuangan : berikut lampirannya b. Dokumen Anggaran dan otorisasinya c. Surat pencairan anggaran d. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3 3. UU. No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang sudah di audit	mengambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
5,	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut nya , review laporan keuangan	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
KEPEGAWAIAN					
6	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU. No. 39 Tahun 199 tentang Hak Azazi Manusia PP No 26 Tahun 1 977 tentang pengujian kesehatan PNS Pemenkas No 269.menkes/PER/III/2008 tentang rekam medis	Selama UU berlaku, Selama yang bersangkutan menjadi pegawai, apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	menjaga privasi, melindungi dari penyalahgunaan data pribadi yang bersifat rahasia
6,1	1. Biodata Pegawai				
6,2	2. Riwayat, Kondisi, dan perawatan kesehatan, fisik dan psikis seseorang a. Data Rekam Medis Pasien / poliklinik				
	b. Hasil Uji Kesehatan Pegawai c. Hasil Rekomendasi Tes Psikologi, bimbingan konseling				

6,3	Kde Rekening Bank Pegawai	UU. Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 angka 6	selama Kode masih digunakan	penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	menjaga keamanan rekening bank
6,4	Rincian hasil uji kompetensi ASN/Pejabat	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	melindungi rahasia pribadi seorang ASN
NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
6,5	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan h	sampai ada keputusan tetap	1. dapat menghambat proses penegakan hukum 2. mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	1. memperlancar proses penegakan hukum 2. menjaga rahasia pribadi seorang PNS
6,6	Dokumen pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan /menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
6,7	Dokumen Penilaian Kinerja PNS	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	1. dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 2. mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	1. mengamankan proses penyusunan kebijakan 2. melindungi rahasia pribadi seorang PNS
6,8	Dokumen pengelolaan kepegawaian; (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun, dan administrasi kepegawaian)	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
TELEKOMUNIKASI					
7	Kode Akses /paswoord aplikasi elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE	Selama Undang-Undang Berlaku	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	keamanan data bisa terjaga dengan baik
8	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
9	Berita / Radiogram Rahasia	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
10,	Jalur Komunikasi VVIP	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



Wahyudi, S.Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196711061990031009